

ISSN : 3123-1659



lembaga pengelola dana pendidikan

POLICY BRIEF

AGAMA DAN ILMU SOSIAL

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025



PEMBELAJARAN DARI DINAMIKA OTORITAS KEISLAMAN
DI MESIR UNTUK INDONESIA

Penulis:

Muhammad Latif Fauzi¹, Imam Mustofa², Reza Shaker Ardekani³,
Zulfa Aulia⁴

¹⁻⁴ Tim Peneliti MORA UIN Raden Mas Said Surakarta

PEMBELAJARAN DARI DINAMIKA OTORITAS KEISLAMAN DI MESIR UNTUK INDONESIA

Nama Penulis: Muhammad Latif Fauzi, Imam Mustofa, Reza Shaker Ardekani, Zulfa Aulia

Ringkasan

Penelitian tentang otoritas keislaman di Mesir, khususnya peran Al-Azhar Al-Syarif dan Dar Al-Ifta' Al-Mishriyyah, memberikan wawasan penting tentang bagaimana institusi keagamaan berevolusi dalam konteks sosial-politik yang dinamis, termasuk tantangan dari modernisasi, kolonialisme, dan transformasi digital. Mesir sebagai negara dengan warisan Islam yang kaya dan institusi keagamaan yang berpengaruh, menghadapi kompleksitas pengelolaan otoritas keagamaan antara tradisi, negara, dan masyarakat sipil.

Kata kunci: Otoritas Keislaman; Mesir; Indonesia; Transformasi Digital; Al-Azhar.

Isu Kunci

- **Institusi keagamaan sebagai pilar sosial dan politik**

Al-Azhar dan Dar Al-Ifta' berperan sebagai penjaga tradisi sekaligus mediator antara teks agama dan praktik sosial. Namun, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas dan politik negara.

- **Peran negara dalam mengontrol dan mengatur otoritas agama**

Negara Mesir, melalui regulasi dan pengangkatan pejabat agama, berusaha menjaga kontrol atas lembaga keagamaan agar selaras dengan kepentingan politik. Strategi ini menghasilkan dualisme antara Islam resmi negara dan Islam alternatif yang berkembang di masyarakat.

- **Tantangan transformasi digital dan pluralitas otoritas**

Kemajuan teknologi digital membuka ruang baru bagi aktor keagamaan non-tradisional, termasuk tokoh agama daring tanpa kredensial formal, yang menggeser monopoli institusi tradisional dan menciptakan fragmentasi otoritas keagamaan.

- **Dinamika hubungan antara militer, Islam, dan masyarakat sipil**

Militer di Mesir memiliki peran dominan dalam menjaga stabilitas politik dan mengatur ruang ekspresi Islam politik, termasuk tindakan represif terhadap kelompok Islam yang dianggap mengancam kekuasaan.

- **Peran Islam sebagai simbol perlawanan dan identitas nasional**

Islam berfungsi sebagai landasan sosial-politik dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan otoritarianisme, namun juga menjadi arena perebutan pengaruh antara kekuatan sekuler dan Islamis.

Pendahuluan

Selama berabad-abad, otoritas agama di dunia Muslim berdiri dengan ulama dan pusat-pusat pengetahuan Islam berfungsi sebagai pilar utama. Di Mesir, tradisi ini menemukan ekspresi yang paling menonjol di Universitas Al-Azhar. Melengkapi institusi ini adalah Dar al-Ifta al-Misriyyah, badan yang berafiliasi dengan negara yang dipercayakan dengan tugas penting untuk mengeluarkan fatwa tentang masalah hukum dan praktik Islam. Entitas-entitas ini berfungsi sebagai saluran utama dan seringkali tunggal dalam membentuk wacana agama, memandu praktik ritual, dan menyediakan kerangka etika dan moral yang menopang kehidupan sosial.

Namun, pada dekade terakhir abad ke-20 dan ke-21 terjadi pembentukan ulang lanskap informasi global yang dipicu oleh revolusi digital. Proliferasi internet yang cepat, jangkauan platform media sosial yang melampaui hambatan geografis dan sosial, dan meningkatnya aksesibilitas teknologi seluler yang kuat telah secara fundamental mengubah cara individu di seluruh dunia mengakses, mengonsumsi, dan berinteraksi dengan semua jenis informasi, termasuk yang sakral dan spiritual. Transformasi digital ini tidak hanya menyentuh kehidupan religius, melainkan telah memicu pembentukan ulang otoritas agama dengan dampak yang sangat signifikan dan kompleks. Batas-batas penyebaran pengetahuan agama yang dulunya ditentukan dengan jelas telah menjadi makin keropos, sifat, sumber, dan legitimasi otoritas agama secara aktif dinegosiasikan ulang dalam medan yang luas dan seringkali tidak diatur di bidang digital.

Belajar dari pengalaman entitas di Mesir di atas, policy brief ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons transformasi otoritas agama di tanah air yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital.

Pembahasan

Implikasi Untuk Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sistem keagamaan yang pluralistik, dapat mengambil pelajaran penting dari studi Mesir ini untuk mengelola hubungan antara agama dan negara, serta menanggapi perubahan sosial dan teknologi:

Penguatan Institusi Keagamaan yang Berbasis Ilmu dan Keadaban

- Perkuat lembaga keagamaan formal yang mampu menjadi rujukan ilmiah dan moral, serupa peran Al-Azhar, untuk menjaga otoritas keagamaan yang sah dan moderat.
- Dorong integrasi pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk menghadapi tantangan zaman.

Kebijakan Pengaturan Otoritas Keagamaan yang Transparan dan Inklusif

- Hindari dominasi politik yang berlebihan terhadap institusi keagamaan agar tetap independen dan kredibel.
- Bangun mekanisme pengawasan yang adil dan dialogis antara negara, lembaga agama, dan masyarakat sipil untuk mengelola pluralitas suara keagamaan.

Adaptasi terhadap Era Digital dengan Strategi Komunikasi Agama Modern

- Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan dakwah moderat dan edukasi keagamaan yang berimbang.
- Sediakan ruang bagi figur agama digital yang kredibel untuk menghindari dominasi narasi ekstremisme atau informasi yang salah.

Penguatan Masyarakat Sipil dan Peran Aktif Umat dalam Dialog Keagamaan

- Dorong partisipasi masyarakat dalam diskursus keagamaan dan sosial untuk membangun iklim toleransi dan inklusi.

- Berdayakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan karakter bangsa.

Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan Beragama

- Jaga keseimbangan antara pengawasan terhadap aktivitas keagamaan yang berpotensi radikal dan perlindungan hak kebebasan beragama.
- Terapkan pendekatan yang humanis dan preventif dalam penanggulangan radikalisme agama.

Rekomendasi

Pemerintah Indonesia perlu segera mengimplementasikan lima langkah strategis ini untuk mengelola dinamika otoritas keagamaan, memperkuat narasi moderat, dan beradaptasi terhadap tantangan era digital, belajar dari pengalaman Mesir.

No.	Rekomendasi	Tindakan Prioritas
1	Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama	Integrasi kurikulum berbasis moderasi Islam dan literasi digital dalam pendidikan agama formal dan informal.
2	Penguatan Kapasitas Lembaga Keagamaan	Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi ulama serta tokoh agama digital agar memenuhi standar kredibilitas.
3	Pembangunan Platform Dakwah Digital	Kembangkan portal resmi yang mudah diakses untuk fatwa, ceramah, dan edukasi keagamaan dengan kontrol kualitas
4	Dialog Antar Agama dan Antar Komunitas	Selenggarakan forum lintas agama dan komunitas untuk meredam potensi konflik dan memperkuat kerukunan.
5	Penguatan Regulasi Keamanan Siber	Tingkatkan pengawasan dan literasi terhadap penyebaran konten keagamaan yang provokatif dan radikal.

Kesimpulan

Transformasi otoritas keagamaan di Mesir memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan agama, politik, dan teknologi dalam membentuk masyarakat modern. Indonesia dapat memetik hikmah dari dinamika ini untuk mengembangkan sistem keagamaan yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman yang moderat dan damai

Daftar Pustaka

Abu-Rabi, Ibrahim M. "Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dar al-Ifta." *Journal of Church and State* 41, no. 1 (1999). <https://doi.org/10.1093/jcs/41.1.137>.

Andok, Mónica. "The Impact of Online Media on Religious Authority." *Religions* 15, no. 9 (2024). <https://doi.org/10.3390/rel15091103>.

Asad, Talal. "Thinking About Tradition, Religion, and Politics in Egypt Today." *Critical Inquiry* 42, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.1086/683002>.

Bano, Masooda, and Hanane Benadi. "Regulating Religious Authority for Political Gains: Al-Sisi's Manipulation of al-Azhar in Egypt." *Third World Quarterly* 39, no. 8 (2017). <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1369031>.

- Bunt, Gary R. "The Qur'an and the Internet." In *The Routledge Companion to the Qur'an*, edited by George Archer, Maria M. Dakake, and Daniel A. Madigan. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781315885360>.
- El-Beshry, Tarek. "Relationship between State and Religion: Egypt After the Revolution." *Contemporary Arab Affairs* 6, no. 3 (2013). <http://dx.doi.org/10.1080/17550912.2013.812595>.
- Hatina, Meir. "Historical Legacy and the Challenge of Modernity in the Middle East: The Case of al-Azhar in Egypt." *The Muslim World* 93, no. 1 (2003). <http://dx.doi.org/10.1111/1478-1913.00014>.
- Haynes, Jeffrey. "Religion and Democratisation: What Do We Now Know?" *Journal of Religious and Political Practice* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.1080/20566093.2016.1181385>.
- Horsfield, Peter. "The Media and Religious Authority from Ancient to Modern." In *The Media and Religious Authority*, edited by Stewart M. Hoover. USA: Penn State University Press, 2016. <https://doi.org/10.1515/9780271077956>.
- Karjula, Siiri. "Contemporary Online Fatwas on Birth Control and Muslim Gender Norms : A Case Study of Online Fatwa Collection of Egyptian Dar al-Ifta'." Tesis, University of Helsinki, 2024. <http://hdl.handle.net/10138/577106>.
- Khamis, Sahar. "'Cyber Ummah': The Internet and Muslim Communities." In *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives*. Cham: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32626-5_69.
- Luisa Orelli. "Islam Institutionnel Égyptien et Modernité: Aperçu Du Débat à Travers Les Fatâwâ d'al-Azhar et de Dâr al-Iftâ'." *Studia Islamica* 95 (2002). <https://doi.org/10.2307/1596144>.
- Mohiuddin, Asif. "Islam, Religious Authority and The State: The Case of Egypt." *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1080/25765949.2022.2097730>.
- Murea, Radu. "What Went Right? Islam, Modernity and the Arab Spring." In *Religion and Politics in the 21st Century: Global and Local Reflections*, edited by Natalia Vlas and Vasile Boari. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013.
- Sousa, Marco Túlio de, Mihaela-Alexandra Tudor, and Giulia Evolvi. "Media, Religion and Religiosity in the Digital Age." *Tropos: Comunicação, Sociedade e Cultura* 10, no. 1 (2021). <https://periodicos.ufac.br/index.php/tropos/article/view/5194>.
- Zeghal, Malika. "Religion and Politics in Egypt: The Ulema of al-Azhar, Radical Islam, and the State (1952-94)." *International Journal of Middle East Studies* 31, no. 3 (1999). <https://www.jstor.org/stable/176217>.



Policy Brief Agama dan Ilmu Sosial merupakan upaya mengantarmukakan riset dan kebijakan (*research-policy interface*) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Media ini dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Mas Said Surakarta. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan UIN Raden Mas Said Surakarta.

ISSN 3123-1659

